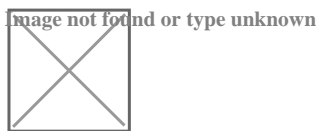


Capai Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas, Pemerintah Dorong Inovasi Perumusan Kebijakan dan Tingkatkan Pelayanan Publik



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

HM.4.6/509/SET.M.EKON.3/09/2022

Capai Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkualitas, Pemerintah Dorong Inovasi Perumusan Kebijakan dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Jakarta, 15 September 2022

Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang maju dan sejahtera pada peringatan 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045. Transformasi dan reformasi struktural melalui berbagai inovasi kebijakan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, PDB per kapita Indonesia meningkat dari USD3,172 pada tahun 2010 menjadi USD4,350 pada tahun 2021 dan merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari *middle income trap* dan untuk kemudian menjadi negara maju pada tahun 2045.

Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerintah juga terus mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan prinsip utama “*No One Left Behind*”. Tujuan tersebut dicapai melalui empat elemen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pembangunan sosial, konservasi sumber daya alam, dan tata kelola yang baik.

“Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pengarusutamaan target dan indikator pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan melokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat regional,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara The 1st International Conference On Community Service & Public Policy (ICCSP 2022) Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan tema “*Innovation for Better Community Development and Public Policy*”, Kamis (15/09).

Untuk melaksanakan reformasi struktural dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melakukan berbagai inovasi kebijakan seperti pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan ekonomi hijau, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program Kartu Prakerja, dan ketahanan pangan.

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan inovasi regulasi untuk mendukung reformasi struktural jangka menengah hingga panjang dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, iklim usaha, hyper regulasi, dan kebijakan *out-of-sync*. Untuk mendorong transformasi dan reformasi ekonomi Pemerintah membuat inovasi kebijakan dengan pengembangan IKN di Pulau Kalimantan untuk mendorong diversifikasi ekonomi. Pemindahan IKN bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah karena sebelumnya sebagian besar kegiatan ekonomi berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Selain itu, konsep ekonomi hijau menjadi penting setelah adanya pandemi Covid-19 dan fenomena perubahan iklim yang menyadarkan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan harus dilakukan dengan rendah karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai target emisi nol bersih dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

“Di masa pandemi, Pemerintah terus mendukung berbagai kebijakan yang akomodatif dan mendorong pertumbuhan bisnis melalui Program PEN. Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan Program PEN sebesar Rp455,62 triliun rupiah yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah telah menyiapkan Program Kartu Prakerja. Program ini merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang 100% dioperasikan secara digital melalui kemitraan multi stakeholder.

Pemerintah juga mendorong kebijakan yang menjamin ketahanan pangan untuk menciptakan pangan yang terjangkau dan aman bagi generasi sekarang dan mendatang. Ketahanan pangan Indonesia baru-baru ini juga telah diapresiasi oleh International Rice Research Institute (IRRI) dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia atas sistem ketahanan pangan yang baik dan keberhasilan swasembada beras selama tiga tahun (2019-2021). Pencapaian tersebut diperoleh melalui inovasi teknologi padi, perbaikan infrastruktur pertanian disertai dengan varietas padi unggul, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi padi sehingga Indonesia berhasil swasembada.

“Beberapa contoh dari kebijakan tersebut adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah baik dari sisi perumusan kebijakan maupun peningkatan pelayanan publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang sejalan dengan *The Sustainable Development Goals*,” tutup Menko Airlangga. (dlt/fsr)

**Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto**

Website: www.ekon.go.id

Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, & YouTube: @PerekonomianRI

Email: humas@ekon.go.id

LinkedIn: Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia